

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Suharto, E. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : ALFABETA, cv
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamdi. M. (2015). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hayat.(2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang : Intrans Publishing.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Mansur. (2004). *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*, Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : KENCANA.
- Suaib. M Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta : CALPULIS.

Jurnal:

B Haryadi. (2019). *Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Kebijakan Perlindungan Bahasa Sunda*. Diakses tanggal 16 September 2022.

Novliwanda dkk. (2020). *Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Diakses Tanggal 18 September 2022.

MH Idris. (2019). *Proses Formulasi Peraturan Daerah (Studi pada Peran DPRD Lombok Barat dalam Proses Formulasi Perda No. 3 Tahun 2015)*. Diakses tanggal 16 September 2022.

R Efendi. (2021). *Peranan Aktor dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman*. Diakses tanggal 16 September 2022.

Yuyu Rahmayani dkk. (2021). *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bulukumba*. Diakses Tanggal 18 September 2022.

Skripsi:

Agustang. (2016). *Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo*.

Dini Tarawinda. (2017). *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Palembang*.

Ferry Apriady. (2013). *Formulasi Kebijakan Kenaikan Pajak di Kota Tasikmalaya dalam Perspektif Ekonomi Politik*.

Haniffudin. (2019). *Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cihonje Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*.

Rendi Supriadi (2021). *Relasi Elit Pesantren dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya*.

Undang-undang & Peraturan Daerah:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Sumber Elektronik:

JDIH Kota Tasikmalaya <https://jdih.tasikmalayakota.go.id/home/dokumen/perda/>
di akses pada tanggal 20 September 2022

Kominfo data.com “Open Data Kota Tasikmalaya”
<https://data.tasikmalayakota.go.id/kementerian-agama-kota-tasikmalaya/jumlah-pondok-pesantren-santri-dan-ustadz-tahun-2021/>
di akses pada tanggal 20 september 2022

Lina Aryani, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai
Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya “
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1994/1567> /di akses pada tanggal 20 September 2022

Liputan6.com <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4491655/6-fakta-menarik-tentang-tasikmalaya-yang-pernah-berjuluk-delhi-van-java/>
di akses pada tanggal 20 September 2022.

Detik.com <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6016532/dprd-kota-tasikmalaya-setujui-pembuatan-perda-pesantren/>
di akses pada tanggal 20 September 2022.